

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN MITIGASI BANJIR DI KABUPATEN GRESIK

Retno Dwi Siswanto¹, Anggraeny Puspaningtyas^{2*}

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Abstract

The flood disaster due to high rainfall and the overflow of the Lamong River which could not accommodate the incoming water discharge resulted in waterlogging in parts of Gresik Regency, especially those that occurred in Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, and Driyorejo Districts. district. Knowing this, the Gresik Regency Government through the BPBD has made various efforts to minimize the impact that will be caused and optimize disaster management. The purpose of this research is to find out how the function of the Gresik Regency Regional Disaster Management Agency is implemented in flood emergency response. The method used in this research is descriptive qualitative with an in-depth approach. In this research using Policy Implementation Theory according to Edward III. The data used in this study were obtained from primary data and secondary data. The results showed that according to Edward III's theory, the implementation of the functions of the Gresik Regency Disaster Management Agency in disaster emergency response had been carried out properly and was also guided by Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Disaster Management.

Keywords: Flood, BPBD, Disaster Management

Introduction

Bencana adalah sebuah peristiwa alam yang terjadi secara tiba-tiba atau alamiah yang mengakibatkan kerusakan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menimbulkan penderitaan manusia yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia. Bencana sering kali mengganggu rutinitas kehidupan sehari-hari, mengancam keselamatan dan kesejahteraan manusia, serta berdampak negatif terhadap lingkungan dan infrastruktur. Dampak bencana dapat meliputi kerugian jiwa, kerugian fisik pada bangunan dan fasilitas, kerugian ekonomi, dan dampak jangka panjang seperti kehilangan mata pencaharian, kerusakan ekosistem, dan kerugian sosial.

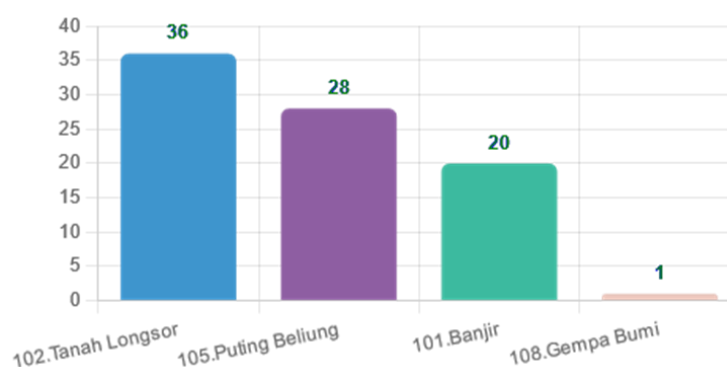
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Danau. Dalam Peraturan Menteri ini, penetapan garis sempadan sungai dan danau merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya air yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan fungsi serta keberlanjutan ekosistem sungai dan danau. Garis sempadan adalah batas atau zona yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan lahan di sekitar sungai dan danau, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penetapan garis sempadan sungai dan danau biasanya memperhatikan beberapa faktor, seperti keberadaan zona rawan banjir, perlindungan vegetasi riparian (vegetasi yang tumbuh di sepanjang sungai), keberlanjutan ekosistem perairan, pengendalian erosi, dan keselamatan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk mencegah encroachment atau perluasan bangunan di daerah yang rawan banjir, melindungi keberadaan vegetasi riparian yang penting dalam menjaga kualitas air dan

habitat satwa liar, serta menghindari kerusakan lingkungan dan bencana yang berkaitan dengan sungai dan danau.

Menurut (Hamida & Widyasamratri, 2019) menyatakan bahwa bencana sebagai kekuatan alam yang bukan di bawah kontrol manusia serta dapat menyebabkan bencana yang menimbulkan kerusakan dan kematian. Penyebab terjadinya bencana alam disebabkan oleh dua faktor yaitu bencana alam yang disebabkan alam itu sendiri. Dan bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Bencana alam yang terjadi, sudah dipastikan akan membawa konsekuensi bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kerawanan mengenai bencana alam tentu bisa diakibatkan oleh minimnya manajemen bencana yang akurat, pengaruh dari lingkungan, ataupun dari manusianya sendiri. Kerugian yang timbulkan oleh bencana alam, seperti kerusakan terhadap lingkungan, kawasan yang ditempati penduduk, harta dan bendanya lenyap, bahkan mengancam nyawa. Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu, terkoordinasi (Jurnal & Mea, 2021).

Secara geografis, nyaris seluruh daerah provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang rawan. Yang mana berpotensi terjadinya peristiwa bencana alam seperti tanah longsor, angin puting beliung, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Banjir menjadi salah satu peristiwa bencana alam yang seringkali terjadi di Jawa Timur, terutama di daerah-daerah yang dataran rendah. Kabupaten Gresik menjadi salah satu dari sekian daerah wilayah di Jawa Timur yang kerap kali mengalami bencana banjir. Malahan banjir sudah menjadi bencana lazim yang menerjang Kabupaten Gresik. Hal tersebut dikarenakan tingginya curah hujan serta meluapnya Kali Lamong.

Banjir merupakan peristiwa alam di mana air meluap dari saluran air yang normalnya digunakan untuk mengalirkan air, seperti sungai, danau, atau saluran drainase. Banjir biasanya terjadi ketika curah hujan yang tinggi, luapan air pasang, atau kombinasi keduanya menyebabkan volume air yang melebihi kapasitas normal saluran tersebut. Datangnya bencana banjir ini dapat diprediksi dengan mencermati curah hujan serta kemana airnya mengalir. Disaat saluran air yang digunakan untuk menadah debit air hujan sudah tidak mampu menampung banyak, maka banjir akan terjadi dan meluas. (Purnomo & Muhammad, 2014).



Sumber : Statistik BNPB, Jawa Timur, tahun 2023 (BNBP, 2023)

Kali Lamong adalah salah satu sungai yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Sungai ini memiliki panjang sekitar 80 kilometer dan mengalir melalui beberapa kota, termasuk Kota Surabaya, Kota Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Kali Lamong memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sungai ini berperan sebagai saluran air bagi aktivitas irigasi pertanian, sumber air bersih, transportasi air, serta sebagai jalur pengelolaan limbah dan drainase perkotaan. Namun,

Kali Lamong juga sering mengalami masalah banjir. Saat curah hujan tinggi atau luapan air pasang terjadi, sungai ini bisa meluap dan menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Banjir di Kali Lamong dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dan infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai. Salah satu daerah aliran sungai Kali Lamong yang sering mengalami banjir yaitu Kabupaten Gresik. Daerah pada Kabupaten Gresik yang biasanya mengalami bencana banjir yaitu: Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Menganti, Cerme serta di Driyorejo (Melalui & Kelembagaan, 2015).

Pada tahun 2023, Kabupaten Gresik sudah beberapa kali tertimpa bencana banjir yang cukup meresahkan masyarakat, hal ini diakibatkan oleh banjir yang terjadi menyebabkan kerugian yang cukup besar, seperti kerusakan di beberapa rumah milik warga, kerusakan terhadap jalan raya dan jalan poros desa yang bisa menimbulkan lubang di jalannya, serta merusak sawah. Pada awal tahun 2023, bencana alam banjir di Kabupaten Gresik telah merendam Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo (BPBD, 2023).

Tabel 1
Total Kejadian Bencana Alam Banjir di Kabupaten Gresik Tahun 2023

| No. | Kecamatan | Jumlah Kejadian |
|-----|----------------|-----------------|
| 1. | Balongpanggang | 6 |
| 2. | Benjeng | 8 |
| 3. | Menganti | 5 |
| 4. | Cerme | 5 |
| 5. | Driyorejo | 4 |

Sumber : BPBD Kabupaten Gresik, 2023

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Gresik yang telah peneliti dapatkan sama halnya dengan tabel diatas, banjir yang terjadi di kisaran bulan Februari hingga Maret 2023 cukup ekstrem. Banjir yang terjadi merendam 5 kecamatan dan 28 desa yaitu Kecamatan Balongpanggang ada Desa Dapet, Sekarputih, Wotansari, Karangsemanding, Banjatagung, dan Pucung. Kecamatan Benjeng ada Desa Sedapruktagen, Deliksumber, Kedungrukem, Bulang Kulon, Munggugiati, Bulurejo, Bengkelolor dan Lundo. Kecamatan Menganti ada Desa Boboh, Gadingwatu, Beton, Pranti, Bringkang. Kecamatan Cerme ada Morowudi, Dungus, Iker-Iker, Pandu, Guranganyar. Kecamatan Driyorejo ada Desa Sumpat, Mojosarirejo, Karangandong, Driyorejo (BPBD Gresik, 2023).

Menilik akibat yang dihasilkan dari adanya bencana alam banjir ini sudah cukup memprihatinkan, oleh karena dibutuhkan upaya untuk menanggulangi bencana oleh pemerintah setempat untuk mengantisipasi dan juga untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman bencana alam tersebut yaitu dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB yang didirikan oleh pemerintah guna meminimalisir resiko akibat bencana alam yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Untuk hal ini, masyarakat sebagai fenomena dari implementasi penanggulangan bencana juga terhitung pengurangan resiko bencana. Masyarakat tersebut memiliki hak untuk berpendapat yang bisa diterapkan untuk acuan prioritas pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana (Ariyanto, 2018).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah salah satu lembaga pemerintah non departemen di tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. BPBD berperan dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana di daerah Provinsi ataupun di

Kabupaten/Kota yang berpedoman kepada kebijakan yang udah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk atas dasar dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. BPBD biasanya dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Lembaga ini memiliki peran yang strategis dalam melindungi masyarakat dari bencana, mengurangi kerentanan, dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana (Stekom, 2023).

Dalam implementasi penanggulangan bencana alam tersebut, pemerintah daerah dan pusat menjadi penanggungjawab atas penyelenggaraan ditingkat daerah maupun ditingkat negara dengan diterbitkannya Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. BPNB dan BPBD bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana baik ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (BNPB, 2008). BPBD Kabupaten Gresik dibentuk sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Pembentukan BPBD Kabupaten Gresik dilakukan untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di wilayah tersebut dan melindungi masyarakat serta aset publik dari risiko bencana. Dimulai dari Pencegahan dan mitigasi bencana, Kesiapsiagaan dan tanggap darurat, Pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana, Koordinasi dan kerjasama, hal tersebut yang dinamakan sebagai manajemen bencana.

Manajemen bencana merupakan pendekatan sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, implementasi, dan evaluasi kegiatan untuk mengurangi risiko bencana, mengelola bencana saat terjadi, serta memulihkan dan membangun kembali wilayah yang terdampak. Manajemen bencana melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah melindungi nyawa, harta benda, dan lingkungan, serta membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia.

Mitigasi banjir merupakan serangkaian upaya yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya banjir untuk mengurangi risiko, dampak, dan kerugian yang disebabkan oleh banjir. Tujuan utama dari mitigasi banjir adalah mencegah atau mengurangi kejadian banjir, melindungi nyawa manusia, melindungi properti, dan meminimalkan kerugian ekonomi serta lingkungan akibat banjir. Beberapa strategi dan tindakan yang termasuk dalam mitigasi banjir antara lain Pemetaan Risiko Banjir, Perencanaan Tata Ruang yang Tepat, Pengelolaan DAS, Sistem Peringatan Dini, Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, Kerjasama Antar Pihak. Penerapan strategi dan tindakan mitigasi banjir secara komprehensif dan berkelanjutan menjadi penting untuk mengurangi risiko banjir dan melindungi masyarakat serta lingkungan dari dampak yang merugikan (Hafizha Maura, 2023).

Menurut penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu” oleh Iis Dewi Fitriani, Wandy Zulkarnaen, dan Agus Bagianto tahun 2021 dalam artikelnya menyatakan tentang pencegahan dan kesiagaan BPBD Prov. Jawa Barat yaitu mempersiapkan diri untuk mampu menghadapi segala ancaman bencana dengan memfokuskan pembahasannya ke mitigasi bencana. Masyarakat diajak untuk bisa melakukan tindakan yang bertujuan melindungi diri dari dampak bahaya bencana. Dengan hal tersebut, makan ancaman akan berkurang dan masyarakat diharapkan

waspada dengan bahaya bencana dan ,eahami cara melindungi keluarganya, dirinya, harta bendanya (Yesayabela et al., 2023).

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memfokuskan tentang: Implementasi Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Banjir yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, sementara itu masalah penelitian dirumuskan, yaitu: "Bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana dan mitigasi banjir yang dilakukan oleh BPBD Gresik?". Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk Mengetahui upaya mitigasi dan pengurangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD terhadap bencana banjir Kali Lamong di Kabupaten Gresik; (2) Untuk memahami peran BPBD dalam majanemen bencana ketika tanggap darurat bencana banjir di Kali Lamong Kabupaten Gresik; (3) Untuk mengetahui berhasil tidaknya pelaksanaan penanggulangan dan mitigasi banjir oleh BPBD Kabupaten Gresik.

Methods

Dalam penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan studi literatur dan wawancara lapangan. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini, didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari menelaah dan mengambil sumber informasi serta data yang disajikan berupa pernyataan para ahli dan sebagian masyarakat sebagai penguat. Sedangkan untuk data sekunder kami peroleh dari beberapa sumber tertulis seperti laporan, dokumen.

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguraikan pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Gresik ketika tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Gresik serta mengetahui keterlibatan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam manajemen bencana saat tanggap darurat bencana banjir Kali Lamong di Kabupaten Gresik.

Untuk menganalisis keberhasilan dari implementasi penanggulangan bencana dan mitigasi banjir di Kabupaten Gresik oleh BPBD, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dimiliki oleh Goerge C Edward III. Implementasi kebijakan menurut Goerge C Edward III adalah "Implementasi kebijakan seperti yang telah kita lihat adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan seperti pengesahan undang-undang, penerbitan perintah eksekutif, penjatuhan keputusan pengadilan, atau diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi masyarakat yang terkena dampaknya." (Edward III, 1980:1).

Jadi, implementasi ialah suatu tindakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang udah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan tentunya harus menelaah terlebih dahulu tentang apakah kebijakan tersebut bisa memberikan dampak yang jelek atau tidak untuk masyarakat. Hal tersebut bertujuan supaya suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat terlebih pula sampai merugikan masyarakat. (Pramono, 2020)

Results & Discussion

Manajemen bencana merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan terus menerus oleh segenap pribadi, kelompok maupun komunitas dalam mengelola bahaya melalui usaha meminimalkan akibat dari bencana yang mungkin timbul, dikutip (Hidayah, 2015). Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, Pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghadapi, merespons, dan mengurangi dampak bencana yang terjadi. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk koordinasi, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan rehabilitasi pasca bencana. Pelaksanaan penanggulangan bencana harus

dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah melindungi nyawa, harta benda, dan lingkungan, serta membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia (Dewina Nasution, SH., 2007).

Proses penanggulangan bencana meliputi tahap : a). Pra Bencana, Menurut Undang-Undang No.24 tahun 2007. Pelaksanaan penanggulangan bencana melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait, seperti badan penanggulangan bencana, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, relawan, dan sektor terkait lainnya. Manajemen yang efektif diperlukan untuk memastikan informasi yang akurat, tindakan yang terkoordinasi, dan optimalisasi sumber daya yang ada; b). Tanggap Darurat Bencana atau Kesiapsiagaan, Pelaksanaan penanggulangan bencana melibatkan upaya kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana, termasuk pengembangan rencana tanggap darurat, latihan dan simulasi, pengorganisasian tim tanggap darurat, dan pengembangan sistem peringatan dini. Ketika bencana terjadi, tanggap darurat dilaksanakan dengan evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, bantuan medis, penyelamatan, dan langkah-langkah lainnya untuk melindungi nyawa dan meminimalkan kerugian; c) Pemulihan dan Rehabilitasi, Setelah bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana melibatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi. Ini meliputi pemulihan infrastruktur yang rusak, rehabilitasi ekonomi dan sosial masyarakat terdampak, dukungan psikososial bagi korban, rekonstruksi wilayah yang terkena dampak, dan upaya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan; d) Pasca Bencana, Pasca bencana bisa dilaksanakan dengan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, rehabilitasi merupakan tindakan perbaikan dan pemulihan segala aspek sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi dikemukakan oleh B.N Marbun adalah pengembalian sesuatu ketempat semulanya; penyusunan atau penggambaran kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula (Bpbdntb, 2023) Setelah bencana dan pelaksanaan penanggulangan, evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dan pembelajaran dari pengalaman tersebut. Evaluasi ini membantu dalam memperbaiki rencana dan tindakan di masa depan serta meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.

Pada artikel ini, peneliti memusatkan pembahasan penanggulangan bencana pada satu aspek yaitu saat tanggap darurat bencana atau kesiapsiagaan. Untuk hal ini bencana yang dimaksud yaitu banjir Kali Lamong di Kabupaten Gresik, yang dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kali Lamong didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam situasi ini, BPBD Kabupaten Gresik melakukan serangkaian upaya yang mencakup kebutuhan pokok, keperluan untuk masyarakat pengungsi, penyelamatan, dan juga pembaruan sarana dan prasarana.

Pada tahap ini, ada progres harus segera dilaksanakan supaya akibat dari bencana banjir tidak menghasilkan kerugian yang semakin membesar. Berdasarkan hasil menelaah dan pengambilan informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai sumber informasi mengenai tanggap darurat atau kesiapsiagaan bencana banjir di Kabupaten Gresik meliputi:

Peninjauan cepat dan tepat

Tanggap darurat bencana melibatkan pengaktifan dan penggunaan sistem peringatan dini yang ada untuk memberi tahu masyarakat tentang ancaman bencana dan memberikan instruksi yang diperlukan. Komunikasi yang efektif juga penting untuk

menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat, pihak terkait, dan tim penanggulangan bencana.

Dalam peninjauan cepat dan tepat, BPBD Kabupaten Gresik melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk memvalidasi BPBD dalam membawa anggota untuk terjun ke lapangan. Peninjauan cepat dan tepat merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara singkat dan efisien setelah terjadinya bencana. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan cepat guna mendapatkan pemahaman awal mengenai dampak bencana, kebutuhan mendesak, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk penanganan dan pemulihan. Beberapa poin penting terkait peninjauan cepat dan tepat yaitu Pengumpulan Data Awal, Analisis Risiko, Koordinasi dan Komunikasi, Prioritas Tindakan, Pemutakhiran Rencana. Untuk pengambilan data yang bisa dikumpulkan berupa berapa saja jumlah korban yang terkena dampak banjir, apasaja yang mengalami kerusakan, dan sebagainya. Hal tersebut digunakan untuk menjadi acuan dalam mengambil tindakan yang perlu dilakukan serta berguna untuk menangkap kebutuhan ketika tanggap darurat bencana terjadi.

Melihat dampak yang akan ditimbulkan, BPBD segera menetapkan tindakan apa yang harus diambil dengan cepat supaya kerugian yang ditimbulkan tidak membesar. Anggota BPBD melaksanakan tugasnya dalam penanganan tanggap darurat bencana sebagai komando, pelaksana, dan juga koordinator ketika berada di lapangan. Saat bencana banjir sedang terjadi, BPBD sudah siap sedia dengan kebutuhan peralatan yang diperlukan seperti menempatkan beberapa perahu dan pelampung yang bisa digunakan untuk melakukan evakuasi terhadap masyarakat di desa yang tergenang banjir cukup tinggi (BPBD, 2023). Selain itu, BPBD juga telah menyiapkan keperluan untuk kebutuhan dasar dan bantuan logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat saat terjadi bencana, seperti posko bantuan, jumbo bag, terpal, serta kebutuhan makanan bagi warga yang mengungsi.

Tim evakuasi BPBD Gresik juga melakukan upaya untuk mengevakuasi warga desa menuju tempat pengungsian, mengingat genangan di pemukiman yang tingginya mencapai 1 meter. Selain memantau dan monitoring banjir, BPBD Kabupaten Gresik juga selalu melakukan pemantauan cuaca dan tinggi air muka kali Lamong. Kemudian menyampaikan kepada Relawan dan warga. Dalam penanganan banjir, BPBD Kabupaten Gresik selalu melakukan koordinasi dengan pihak Instansi yang terkait seperti Dinas Sosial, Dinas PU.

Penggerakan Peralatan dan Logistik

Tanggap darurat juga melibatkan penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, tempat pengungsian, dan perlindungan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Distribusi bantuan dan pendirian posko-posko pengungsian dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Penggerakan peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana banjir adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia secara tepat waktu di lokasi yang tepat. BPBD menempatkan tim penanggulangan bencana yang terlatih dan peralatan yang sesuai di lokasi-lokasi strategis yang terdampak banjir. Tim ini dapat terdiri dari petugas BPBD, relawan, petugas medis, dan personel dari instansi terkait.

BPBD mengelola logistik dan distribusi sumber daya yang dibutuhkan. Ini termasuk pengaturan pengiriman, penyimpanan, dan distribusi peralatan dan bantuan ke lokasi yang membutuhkan. Hal ini melibatkan pengaturan transportasi, penyediaan gudang sementara, dan manajemen persediaan yang efektif. Dalam penggerakan peralatan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik mengirimkan

Jumbo Bag dan Terpal untuk membantu perbaikan beberapa tanggul yang jebol akibat banjir yang dilakukan oleh Dinas Pekerja Umum Kabupaten Gresik. Selain itu, BPBD Kabupaten Gresik juga melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan makanan bagi warga yang mengungsi.

Para relawan yang bertugas di masing-masing desa yang terkena banjir akan melakukan pembagian peralatan dan logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa tersebut. Terutama anak-anak, mereka harus memastikan pengungsi anak-anak aman, tidak kelaparan, dan tidak sakit. Tak hanya itu, para petugas penanggulangan bersama dengan masyarakat juga saling membantu untuk mengonfirmasi memastikan masyarakat telah mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Sehingga pelaksanaan penanggulangan banjir ini dapat terlaksana dengan sesuai yang telah direncanakan.

Tanggap darurat bencana adalah fase awal dari penanggulangan bencana yang terjadi segera setelah bencana terjadi. Pada fase ini, upaya dilakukan untuk memberikan respons cepat dan efektif guna melindungi nyawa manusia, memberikan pertolongan kepada yang terluka, menyediakan kebutuhan dasar, dan memulai langkah-langkah awal untuk stabilisasi situasi. Tanggap darurat bencana merupakan langkah awal yang krusial dalam penanggulangan bencana. Respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Penting untuk melakukan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk badan penanggulangan bencana, pemerintah, lembaga kesehatan, lembaga sosial, dan relawan. Koordinasi yang baik memastikan bahwa upaya tanggap darurat dilakukan secara terorganisir dan efisien. Logistik juga perlu dikelola dengan baik untuk mendistribusikan sumber daya dan bantuan dengan cepat. Selama tanggap darurat bencana, evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memantau perkembangan situasi, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang muncul, dan menyesuaikan respons yang diperlukan. Ini membantu dalam mengoptimalkan upaya tanggap darurat dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul.

Menurut (Nursalim, 2017) Edward III menyatakan beberapa hal atau yang biasa disebut indikator yang bisa menilai faktor keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan, indikator tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Dengan analisis menggunakan empat indikator implementasi kebijakan tersebut yang dijalankan oleh BPBD Kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir yaitu :

Komunikasi

Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana kebijakan.. Dalam komunikasi ini BPBD dengan cepat dan tepat melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk memvalidasi turunnya para personel ke lapangan. Melalui komunikasi ini, dapat diketahui bahwa persiapan yang dilaksanakan oleh seluruh pihak untuk menjalankan program penanggulangan tersebut sudah selesai, baik itu terkait dengan pembagian tugas dan wewenang, pemilihan pelaksana kegiatan, hingga anggaran biaya yang akan diperlukan. Setelah tahapan persiapan selesai, maka program bisa segera dilaksanakan. Komunikasi yang baik memungkinkan koordinasi yang efisien, pengambilan keputusan yang cepat, serta penyampaian peringatan dini dan petunjuk kepada masyarakat. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam penanggulangan bencana. Ini melibatkan pertukaran informasi yang jelas, cepat, dan akurat antara semua pemangku kepentingan terkait, termasuk badan penanggulangan bencana, pemerintah, lembaga kesehatan, lembaga sosial, relawan, dan masyarakat terdampak.

Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran yang penting untuk menjadi kekuatan utama supaya program kebijakan tersebut dapat terlaksana. Jadi sumber daya yang dimaksud tersebut yaitu berupa sumber daya manusia maupun finansial seperti anggota BPBD Kabupaten Gresik, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Relawan, Warga. Mereka telah banyak berpartisipasi dalam membantu BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan banjir di beberapa desa kabupaten Gresik. Sumber daya fisik juga penting, seperti peralatan penanggulangan bencana, alat komunikasi, obat-obatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian, dan transportasi. Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya yang cukup menjadi faktor penting dalam respons bencana yang efektif.

Disposisi

Searah dengan apa yang dikatakan oleh George C. Edward III, penanggulangan banjir di kabupaten Gresik pastilah memerlukan disposisi dari semua pihak yang terlibat, mulai dari BPBD, Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas Sosial, Dinas PU, Relawan hingga masyarakat di lokasi bencana tersebut. Melihat hasil penelitian, dapat kita melihat bahwa BPBD Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan masyarakat sangat mendukung penanggulangan banjir ini. Disposisi yang positif dan proaktif akan bisa meningkatkan efektivitas tim penanggulangan bencana dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana.

Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Gresik, maka penanggung jawab berikan kepada aktor utama, yaitu BPBD Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Meskipun yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan adalah BPBD, akan tetapi tetap saja untuk pelaksanaannya juga memerlukan kerjasama serta kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik. Pembagian tanggung jawab bisa mempermudah proses pelaksanaan kebijakan dan meminimalisir terjadinya konflik antar lembaga yang berakibat pada tidak terealisasinya penanggulangan banjir di Kabupaten Gresik. Struktur birokrasi yang baik memfasilitasi koordinasi yang efektif, pengambilan keputusan yang cepat, dan alokasi sumber daya yang tepat.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilaksanakan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa banjir di Kabupaten Gresik pada awal tahun 2023 diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan meluapnya air kali Lamong. Dampak dari bencana tersebut kemungkinan besar yang ditimbulkan cukup parah, oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya untuk penanggulangan bencana banjir oleh pemerintah untuk mengantisipasi ancaman yang akan ditimbulkan dari bencana tersebut yaitu dengan menerjunkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada saat terjadinya banjir Kali Lamong yang menggenangi beberapa desa yang telah disebutkan sebelumnya, BPBD Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memvalidasi turunnya para personel ke lapangan. Peninjauan cepat dan tepat dilakukan dengan pengambilan data di lapangan pada saat terjadinya bencana. Pada artikel ini, peneliti memusatkan pembahasan penanggulangan bencana pada satu aspek yaitu saat tanggap darurat bencana atau kesiapsiagaan.

Saat bencana banjir sedang terjadi, BPBD sudah bersiap dengan segala peralatan yang dibutuhkan seperti menempatkan beberapa perahu dan pelampung yang akan dipakai untuk melakukan evaluasi terhadap masyarakat di desa yang tergenang banjir cukup tinggi (BPBD, 2023). Selain itu, BPBD juga telah menyediakan keperluan seperti kebutuhan dasar dan bantuan logistik yang pasti diperlukan oleh masyarakat ketika bencana sedang melanda. Selain peralatan fisik, BPBD juga menyiapkan personel terlatih yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, termasuk penanganan banjir. Mereka dilatih untuk mengoperasikan peralatan yang ada dan bekerja dalam tim untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Penting bagi BPBD untuk memiliki peralatan dan personel yang siap digunakan serta terlatih sebelum terjadinya bencana banjir. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat dan efektif saat banjir terjadi, membantu menyelamatkan nyawa, memberikan bantuan, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir.

Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah empat elemen penting dalam penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi efektivitas respons dan manajemen bencana. Keempat elemen ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam penanggulangan bencana. Komunikasi yang baik memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif, disposisi yang positif memperkuat koordinasi dan pengambilan keputusan, dan struktur birokrasi yang baik menyediakan kerangka kerja yang efisien untuk respons bencana yang terkoordinasi. Dalam Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di kabupaten Gresik yang dilakukan oleh BPBD bisa dinyatakan sudah cukup berhasil. Hal tersebut diukur dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan Edward III yakni Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berjalan dengan baik. Dan juga diperkuat dengan informasi bahwa dalam realisasi kebijakan penanggulangan banjir di kabupaten Gresik hingga akhir bulan Maret tahun 2023 sudah perlahan mulai membaik.

Meski demikian, tentu tetap dibutuhkan ada perbaikan untuk kedepannya. Kebijakan penanggulangan banjir tersebut meskipun telah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur. Namun masih terdapat beberapa wilayah belum terlaksana dengan sempurna yang mana dikarenakan kondisi jalan dan sulitnya saluran pembuangan air. Karena itulah pemerintah daerah kabupaten Gresik harus cepat segera menyelesaikan masalah tersebut, supaya permasalahan bencana banjir tahunan di kabupaten Gresik ini semakin minim dan diharapkan tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Management Review*, 2(1), 161. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118>
- BNBP. (2023). *Data Informasi Bencana Indonesia*. Dibi.Bnpb.Go.Id.
- BNPB. (2008). *Perka BNPB No 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.
- BPBD. (2023). *Perkembangan banjir di Gresik*. Bpbd.Gresikkab.Go.Id.
- BPBDGresik. (2023). *Kali Lamong dan Bengawan Solo meluap*. Bpbd.Gresikkab.Go.Id.
- Bpbdntb. (2023). *Penanganan Bencana*. Bpbd.Ntbprov.Go.Id.
- Dewina Nasution, SH., M. s. (2007). *Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang- daerah adalah merupakan tahap transisi antara sistem yang selama ini berjalan dengan sistem baru seperti yang diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007. UU ini menjadi. 24.*

- Hafizha Maura. (2023). *Mengenal Mitigasi Adalah: Jenis, Proses, dan Contohnya*. Detik.Com.
- Hamida, F. N., & Widyasamratri, H. (2019). Risiko Kawasan Longsor Dalam Upaya Mitigasi Bencana Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Pondasi*, 24(1), 67. <https://doi.org/10.30659/pondasi.v24i1.4997>
- Jurnal, J., & Mea, I. (2021). *ANALISIS MANAJEMEN MITIGASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) TERHADAP BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG TANGKUBAN PARAHU DI JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 5(1), 91–111.
- Melalui, U. S., & Kelembagaan, P. (2015). *Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong Pada Kawasan Peri- Kawasan Peri-Urban Surabaya-Gresik Melalui*. 8(November 2013), 48–59.
- Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatoma Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. *Studi Administrasi Publik*, 117–126.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Purnomo, N. H., & Muhammad, F. A. (2014). Strategi Adaptasi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Kali Lamongan Di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. *Swara Bhumi*, 5(2), 40–51.
- Stekom. (2023). *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*. P2k.Stekom.Ac.Id.
- Yesayabela, T. M., Prasetyo, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111–118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>